

FUNGSI SOSIAL ATURAN BERPAKAIAN DI SEKOLAH ISLAM DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI PENDIDIKAN

Choirul Umam¹, Vania Putri Nabila², Siti Maimunah³, Rifqi Khairul Anam⁴

¹Institut Ahmad Dahlan Probolinggo, Indonesia

²Institut Ahmad Dahlan Probolinggo, Indonesia

³Institut Ahmad Dahlan Probolinggo, Indonesia

⁴Institut Ahmad Dahlan Probolinggo, Indonesia

Email: umamchoirul1901@gmail.com¹, vanianabila613@gmail.com², sittimaimunah61@gmail.com³, rifqistaimpro@iad.ac.id⁴

E-Issn: 3063-8313

Received: Desember 2026

Accepted: Desember 2026

Published: Januari 2026

Abstract:

Dress codes in Islamic schools are commonly understood as religious regulations aimed at instilling modesty and moral compliance among students. Such an understanding tends to frame dress codes as individual moral obligations, thereby overlooking their broader social and structural dimensions. This article aims to analyze the social functions of dress codes in Islamic schools from the perspective of the sociology of education. Employing a qualitative-descriptive literature review, this study examines scholarly journal articles, sociological theories, and publicly accessible policy documents from Islamic schools. The findings indicate that dress codes function as mechanisms of bodily discipline, symbols of collective identity formation, and instruments of social control institutionalized within educational systems. Furthermore, dress codes contribute to the reproduction of power relations and social structures through standards of appearance, symbolic representations, and sanction systems. This article argues that dress codes in Islamic schools should not be understood merely as religious norms, but as social practices embedded within the broader project of modern Islamic education.

Keywords: *dress code, Islamic school, sociology of education, bodily discipline, social identity.*

Abstrak:

Aturan berpakaian di sekolah Islam umumnya dipahami sebagai implementasi norma religius yang bertujuan menanamkan kesopanan dan kepatuhan terhadap ajaran agama. Pemahaman ini cenderung menempatkan aturan berpakaian sebagai persoalan moral individual, sehingga mengabaikan dimensi sosial dan struktural yang menyertainya. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis fungsi sosial aturan berpakaian di sekolah Islam dengan menggunakan perspektif sosiologi pendidikan. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dengan pendekatan kualitatif-deskriptif melalui analisis artikel jurnal ilmiah, karya teoretis sosiologi, serta dokumen kebijakan sekolah Islam yang dipublikasikan secara terbuka. Hasil kajian menunjukkan bahwa aturan berpakaian berfungsi sebagai mekanisme pendisiplinan tubuh, simbol pembentukan identitas kolektif, serta instrumen kontrol sosial yang dilembagakan dalam sistem pendidikan. Selain itu, aturan berpakaian juga berperan dalam mereproduksi relasi kekuasaan dan struktur sosial tertentu melalui standar kerapian, simbol, dan sistem sanksi. Artikel ini menegaskan bahwa aturan berpakaian di sekolah Islam tidak dapat dipahami secara reduktif sebagai aturan religius semata, melainkan sebagai praktik sosial yang berkelindan dengan proyek pendidikan Islam modern.

Kata Kunci: *aturan berpakaian, sekolah Islam, sosiologi pendidikan, disiplin tubuh, identitas sosial.*

PENDAHULUAN



Sekolah tidak hanya berfungsi sebagai ruang transmisi pengetahuan, tetapi juga sebagai institusi sosial tempat nilai, norma, dan identitas dibentuk serta direproduksi. Dalam konteks pendidikan Islam, fungsi tersebut dilembagakan melalui berbagai regulasi formal yang mengatur perilaku dan penampilan peserta didik, salah satunya melalui aturan berpakaian. Aturan berpakaian di sekolah Islam umumnya dipahami sebagai implementasi ajaran agama yang bertujuan menanamkan kesopanan, kedisiplinan, dan moralitas siswa. Namun, pemahaman normatif semacam ini cenderung menempatkan aturan berpakaian sebagai persoalan kepatuhan individual, sehingga mengabaikan dimensi sosial dan institusional yang lebih luas.

Dalam kajian sosiologi pendidikan, aturan berpakaian dan seragam sekolah dipahami sebagai bagian dari mekanisme institusional yang mengatur tubuh dan praktik keseharian siswa. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa kebijakan seragam sekolah tidak bersifat netral, melainkan sarat dengan makna simbolik dan relasi kekuasaan yang bekerja melalui regulasi keseharian di lingkungan sekolah (Brunsmas, 2006; Stockton et al., 2002). Melalui pengaturan tersebut, tubuh siswa menjadi medium utama bagi institusi pendidikan untuk menanamkan nilai keteraturan, kepatuhan, dan keseragaman sebagai prasyarat berlangsungnya proses pendidikan.

Dalam pendidikan Islam, fungsi sosial aturan berpakaian menjadi lebih kompleks karena beririsan dengan nilai religius dan moral yang dilekatkan pada tubuh peserta didik. Perkembangan pendidikan Islam modern di Indonesia menunjukkan adanya integrasi antara nilai-nilai keislaman dan sistem pendidikan formal yang bercorak birokratis dan rasional. Proses ini tercermin tidak hanya dalam kurikulum dan manajemen pendidikan, tetapi juga dalam praktik keseharian seperti tata tertib dan aturan berpakaian, yang berfungsi sebagai sarana internalisasi nilai dan pembentukan disiplin siswa (Ependi, 2019; Ruqoiyah, 2019).

Berbagai penelitian sebelumnya telah mengkaji aturan berpakaian dan tata tertib sekolah dalam konteks pendidikan Islam maupun pendidikan umum. Kajian-kajian tersebut umumnya menekankan fungsi normatif dan pedagogis aturan berpakaian dalam pembentukan karakter, moralitas, dan kedisiplinan siswa (Maftuhin, 2018). Penelitian lain juga menunjukkan peran tata tertib sekolah dalam membangun keteraturan sosial dan kultur disiplin di lingkungan pendidikan (Fawaid Moh, 2017). Meskipun memberikan kontribusi penting, sebagian besar studi tersebut masih memandang aturan berpakaian sebagai instrumen pendidikan teknis, bukan sebagai praktik sosial yang berkelindan dengan relasi kekuasaan dan pembentukan subjek.

Berdasarkan kajian tersebut, masih terdapat kesenjangan penelitian dalam melihat aturan berpakaian di sekolah Islam melalui perspektif sosiologi pendidikan. Kajian yang secara eksplisit menempatkan aturan berpakaian sebagai mekanisme pendisiplinan tubuh, pembentukan identitas kolektif, dan regulasi moral institusional masih relatif terbatas. Akibatnya, fungsi sosial aturan berpakaian di luar tujuan religius dan pedagogis belum banyak dibahas secara mendalam.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, permasalahan penelitian dalam artikel ini adalah bagaimana aturan berpakaian di sekolah Islam berfungsi secara sosial dalam

konteks pendidikan. Secara khusus, artikel ini mengkaji bagaimana aturan berpakaian beroperasi sebagai mekanisme pendisiplinan tubuh, pembentukan identitas kolektif, dan regulasi moral dalam praktik pendidikan Islam modern.

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis fungsi sosial aturan berpakaian di sekolah Islam dalam perspektif sosiologi pendidikan. Dengan merujuk pada konsep pendisiplinan tubuh yang dikemukakan oleh Foucault, gagasan habitus dan kekuasaan simbolik dari Bourdieu, serta kerangka sekolah sebagai institusi moral regulation yang dikembangkan oleh Rousmaniere, Dehli, dan De Coninck-Smith, artikel ini menawarkan pembacaan sosiologis terhadap aturan berpakaian sebagai praktik institusional, bukan semata-mata sebagai kewajiban religius. Dengan demikian, artikel ini diharapkan dapat memperkaya kajian sosiologi pendidikan Islam melalui pemahaman yang lebih reflektif dan kritis terhadap kebijakan aturan berpakaian di sekolah Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dengan pendekatan analisis konseptual kritis yang berpijak pada Sosiologi *Ereignis*. Alih-alih memandang aturan berpakaian sebagai "fakta sosial" objektif yang terpisah dari peneliti, pendekatan ini menempatkannya sebagai fenomena yang harus dibaca melalui lensa hermeneutik-fenomenologis. Fokus utama metode ini adalah menyingkap asumsi ontologis di balik regulasi berpakaian dengan memperlakukannya sebagai "peristiwa bermakna" (*Ereignis*) yang mengungkapkan bagaimana dunia siswa dikonstitusikan dalam institusi pendidikan Islam modern (Anam, 2025).

Analisis ini diperdalam dengan menggunakan konsep habitus dan kekuasaan simbolik Bourdieu yang dikaitkan dengan struktur *Vorhabe* (pra-pemahaman) dalam situasi hermeneutik (Anam, 2025). Aturan berpakaian dipahami sebagai upaya penanaman disposisi yang diterima sebagai kewajaran (*doxa*), namun sebenarnya menyimpan mekanisme dominasi. Melalui metode ini, peneliti membedah bagaimana sekolah melakukan kekerasan simbolik dengan menetapkan standar "siswa ideal" yang berpotensi mengaburkan ketimpangan sosial dan menekan ekspresi individual siswa.

Prosedur analisis data dilakukan melalui siklus lingkaran hermeneutik, di mana peneliti bergerak secara dialektis antara teks aturan berpakaian dan konteks proyek pendidikan Islam modern. Peneliti menolak posisi sebagai pengamat netral dan memilih menjadi partisipan yang terlibat secara refleksif untuk menyingkap makna di balik standarisasi visual (Anam, 2025). Dalam tahap ini, setiap regulasi dibaca sebagai proses *unconcealment* atau pengungkapan tentang bagaimana nilai religius berkelindan dengan rasionalitas birokratis.

Metode ini menekankan pada penghancuran dualitas subjek-objek dalam perjumpaan penelitian. Dengan menggeser unit analisis dari "fakta sosial" ke "peristiwa bermakna" (*Ereignis*), penelitian ini bertujuan untuk memahami dunia peserta didik secara utuh dan otentik. Tujuan akhirnya bukan untuk merumuskan hukum universal, melainkan untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana transendensi dan makna disingskapkan di tengah kepongungan regulasi tubuh yang mekanistik (Anam, 2025).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Aturan Berpakaian sebagai Mekanisme Disiplin Tubuh

Dalam perspektif sosiologi pendidikan, tubuh peserta didik merupakan medan utama tempat nilai, norma, dan kepatuhan dilembagakan melalui praktik institusional. Sekolah modern bekerja melalui mekanisme disiplin yang menata tubuh secara rinci, sistematis, dan berulang untuk menghasilkan kepatuhan yang stabil. Dalam kerangka ini, aturan berpakaian di sekolah Islam dapat dipahami sebagai bagian dari teknologi pendisiplinan yang mengatur bagaimana tubuh siswa ditampilkan, diawasi, dan dinilai di ruang publik sekolah, sebagaimana dijelaskan dalam konsep disiplin tubuh oleh Foucault (Foucault, 1975).

Regulasi mengenai panjang pakaian, kelonggaran busana, warna seragam, serta atribut yang diperbolehkan dan dilarang menunjukkan bahwa tubuh siswa menjadi objek pengaturan yang berkelanjutan. Pengaturan ini tidak hanya membatasi pilihan berpakaian, tetapi juga membentuk kebiasaan dan persepsi siswa tentang tubuh yang dianggap pantas dan sesuai dengan norma institusional. Melalui praktik semacam ini, disiplin tidak lagi bersifat eksternal, melainkan perlahan terinternalisasi sebagai bagian dari kebiasaan keseharian siswa (Foucault, 1975).

Dokumen tata tertib sekolah Islam memperlihatkan bahwa pelanggaran terhadap aturan berpakaian diklasifikasikan sebagai pelanggaran disiplin yang memiliki konsekuensi institusional. Sistem poin dan sanksi bertingkat menegaskan bahwa kepatuhan terhadap aturan berpakaian diposisikan sebagai indikator awal kedisiplinan siswa secara keseluruhan. Temuan ini sejalan dengan kajian tentang pendidikan Islam yang menunjukkan bahwa pengaturan busana berfungsi sebagai strategi pendisiplinan tubuh untuk membentuk kebiasaan patuh dan terkendali, bukan semata-mata sebagai implementasi norma moral (Maftuhin, 2018).

Seragam Sekolah dan Pembentukan Identitas Kolektif

Selain berfungsi sebagai mekanisme pendisiplinan, aturan berpakaian juga berperan penting dalam pembentukan identitas kolektif siswa. Seragam sekolah dan busana Muslim yang diwajibkan menjadi simbol keanggotaan institusional sekaligus penanda identitas religius yang membedakan siswa dari kelompok sosial lainnya. Melalui keseragaman visual, sekolah membangun citra kebersamaan dan identitas bersama yang dilembagakan secara simbolik (Brunsmas, 2006; Ma'arif, 2019)

Dalam perspektif Bourdieu, praktik berpakaian yang dilembagakan dapat dipahami sebagai proses internalisasi habitus, yakni disposisi yang terbentuk melalui praktik keseharian yang berulang dan diterima sebagai sesuatu yang wajar (Bourdieu, 1990). Aturan berpakaian yang diterapkan secara konsisten di sekolah Islam membentuk cara siswa memandang tubuh, kesopanan, dan identitas diri sesuai dengan nilai yang diidealkan institusi.

Pendidikan Islam modern memanfaatkan simbol-simbol berpakaian untuk membangun identitas religius dan citra institusional. Busana Muslim tidak hanya dimaknai sebagai kewajiban keagamaan, tetapi juga sebagai representasi nilai kesalehan, ketertiban, dan moralitas yang ingin ditampilkan oleh sekolah. Proses ini berkontribusi pada reproduksi identitas sosial Muslim melalui praktik simbolik yang dilembagakan dalam institusi pendidikan (Asrori, Saifudin; Syauqi, 2020).

Namun, pembentukan identitas kolektif melalui seragam juga bersifat ambivalen. Identitas yang dibentuk cenderung normatif dan homogen, sehingga berpotensi mengaburkan keragaman latar belakang sosial dan pengalaman individual siswa. Dalam konteks ini, aturan berpakaian tidak hanya membentuk identitas, tetapi juga menetapkan batas-batas identitas yang dianggap sah dan ideal oleh institusi (Bourdieu, 1977).

Kontrol Sosial dan Kekuasaan Simbolik dalam Aturan Berpakaian

Klaim bahwa seragam sekolah menciptakan kesetaraan perlu dibaca secara kritis. Sejumlah kajian menunjukkan bahwa standar berpakaian yang seragam justru dapat mereproduksi ketimpangan sosial secara simbolik. Perbedaan latar belakang sosial ekonomi siswa tetap terefleksi melalui kualitas seragam, tingkat kerapian, dan kemampuan memenuhi standar institusional yang ditetapkan sekolah (Sarijanah, Herna; Islamy, Fahmi Jahidah; Meilani, 2025).

Fenomena ini dapat dipahami sebagai bentuk kekerasan simbolik, yakni mekanisme dominasi yang bekerja secara halus dan diterima sebagai kewajaran oleh pihak yang didominasi. Aturan berpakaian menetapkan standar tertentu yang tidak selalu dapat dipenuhi secara setara oleh semua siswa, namun kegagalan memenuhi standar tersebut sering dipersepsikan sebagai kesalahan individual, bukan sebagai persoalan struktural (Bourdieu, 1977).

Selain itu, aturan berpakaian berfungsi sebagai instrumen kontrol sosial yang mengatur ekspresi tubuh dan identitas siswa. Sistem sanksi yang dilekatkan pada pelanggaran aturan berpakaian menunjukkan bahwa sekolah memiliki otoritas untuk menilai, mengoreksi, dan mendisiplinkan tubuh siswa. Dalam kerangka rasionalisasi institusional, regulasi semacam ini berfungsi untuk menciptakan keteraturan dan stabilitas organisasi melalui aturan formal yang mengikat perilaku individu (Sari, 2022).

Dalam konteks sekolah Islam, kontrol sosial melalui aturan berpakaian memperoleh legitimasi ganda, yakni legitimasi institusional dan legitimasi religius. Pelanggaran terhadap aturan berpakaian tidak hanya dipahami sebagai pelanggaran disiplin administratif, tetapi juga sebagai penyimpangan nilai moral dan religius yang dilembagakan. Kondisi ini memperkuat daya kontrol simbolik aturan berpakaian dalam membentuk kepatuhan siswa (Sarijanah, Herna; Islamy, Fahmi Jahidah; Meilani, 2025).

Aturan Berpakaian dalam Kerangka Modernisasi Pendidikan Islam

Modernisasi pendidikan Islam di Indonesia ditandai oleh upaya mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dengan sistem pendidikan modern yang bercorak rasional dan birokratis. Proses ini melibatkan penguatan regulasi institusional sebagai sarana pembentukan subjek didik yang disiplin dan beridentitas jelas (Ependi, 2019; Ruqoiyah, 2019). Aturan berpakaian menjadi salah satu medium utama dalam proses tersebut karena tubuh siswa diposisikan sebagai locus internalisasi nilai.

Modernisasi pendidikan Islam tidak hanya tercermin dalam perubahan kurikulum dan metode pembelajaran, tetapi juga dalam praktik keseharian yang membentuk disposisi dan kebiasaan siswa. Aturan berpakaian yang rinci dan sistematis merefleksikan upaya sekolah Islam untuk menyesuaikan diri dengan

tuntutan modernitas, sekaligus mempertahankan identitas religiusnya (Ruqoiyah, 2019). Namun demikian, modernisasi tersebut juga membawa konsekuensi berupa peningkatan kontrol institusional terhadap tubuh dan perilaku siswa. Ketegangan antara pembentukan disiplin dan pengakuan terhadap agensi siswa menjadi isu penting dalam pendidikan Islam kontemporer. Aturan berpakaian, meskipun dimaksudkan untuk membentuk karakter dan identitas, berpotensi membatasi ruang ekspresi individual jika diterapkan secara kaku dan tanpa refleksi kritis (Ependi, 2019).

Dengan demikian, aturan berpakaian di sekolah Islam tidak dapat dilepaskan dari proyek modernisasi pendidikan Islam yang lebih luas. Ia berfungsi sebagai sarana internalisasi nilai, pembentukan identitas, dan kontrol sosial, sekaligus merefleksikan dinamika antara tradisi religius dan rasionalitas modern dalam institusi pendidikan.

Diskusi Reflektif

Pembacaan sosiologis terhadap aturan berpakaian di sekolah Islam menunjukkan bahwa regulasi tersebut beroperasi tidak hanya pada level teknis-disipliner, tetapi juga pada level moral dan pembentukan subjek. Sekolah dapat dipahami sebagai institusi moral regulation yang membentuk norma dan identitas melalui aturan keseharian yang tampak sederhana namun sarat makna. Dalam kerangka ini, regulasi berpakaian bekerja dengan menautkan kepatuhan administratif pada penilaian moral terhadap tubuh dan penampilan siswa, sebagaimana dijelaskan dalam tradisi kajian tentang sekolah dan regulasi moral (Rosmaniere, Kate; Dehli, Karl; Smith, 1997).

Aturan berpakaian membentuk gambaran tentang “siswa ideal” yang religius, tertib, dan bermoral melalui standar normatif yang dilembagakan. Proses ini sejalan dengan pandangan bahwa pendidikan berfungsi membangun moral kolektif melalui praktik institusional yang berulang dan terinternalisasi dalam kebiasaan keseharian (Husaeni, 2023). Dengan demikian, kepatuhan terhadap aturan berpakaian tidak hanya dinilai sebagai kepatuhan administratif, tetapi juga sebagai indikator internalisasi nilai moral yang diharapkan institusi.

Namun, regulasi moral semacam ini bersifat ambivalen. Standar normatif yang dilembagakan berpotensi mengaburkan keragaman latar belakang dan pengalaman siswa. Dalam perspektif Bourdieu, praktik keseharian yang dilembagakan membentuk habitus yang mereproduksi struktur sosial melalui penerimaan atas standar yang dianggap wajar, meskipun sesungguhnya merupakan konstruksi institusional (Bourdieu, 1977). Aturan berpakaian, dalam hal ini, berkontribusi pada normalisasi identitas tertentu sekaligus membatasi ekspresi alternatif.

Kajian tentang kebijakan seragam sekolah juga menunjukkan ambivalensi tersebut. Di satu sisi, regulasi berpakaian dipromosikan sebagai sarana menciptakan keteraturan dan kebersamaan; di sisi lain, ia berfungsi sebagai instrumen kontrol sosial yang memperkuat kepatuhan dan konformitas (Brunsma, 2006; Stockton et al., 2002). Dalam konteks sekolah Islam, legitimasi religius memperkuat daya regulatif aturan berpakaian, sehingga kepatuhan memperoleh makna simbolik yang lebih kuat.

Dalam konteks Indonesia, temuan ini diperkuat oleh kajian mengenai tata tertib dan kultur sekolah yang menunjukkan bahwa regulasi keseharian termasuk

aturan berpakaian berperan penting dalam pembentukan disiplin dan karakter siswa (Agustin et al., 2024; Fawaid Moh, 2017). Meski demikian, kajian-kajian tersebut juga menegaskan perlunya pendekatan reflektif agar regulasi tidak semata menekankan kepatuhan, tetapi juga mempertimbangkan agensi dan pengalaman subjektif siswa.

Implikasi Kebijakan Pendidikan Islam

Temuan artikel ini memiliki implikasi penting bagi perumusan dan implementasi kebijakan pendidikan Islam. Pertama, aturan berpakaian perlu dipahami sebagai praktik sosial dan simbolik, bukan semata regulasi teknis atau kewajiban normatif. Pemahaman ini memungkinkan kebijakan berpakaian ditempatkan secara utuh dalam tujuan pendidikan yang lebih luas, yaitu pembentukan karakter dan identitas siswa secara reflektif.

Kedua, kebijakan aturan berpakaian perlu dirancang dengan kesadaran terhadap potensi reproduksi kekuasaan simbolik. Standar berpakaian yang seragam dapat secara tidak langsung mereproduksi ketimpangan sosial dan menekan ekspresi individual jika tidak disertai sensitivitas terhadap keragaman kondisi sosial ekonomi siswa (Sarijanah, Herna; Islamy, Fahmi Jahidah; Meilani, 2025). Oleh karena itu, pendekatan kebijakan yang adaptif dan kontekstual diperlukan agar nilai yang ingin ditanamkan tidak berubah menjadi mekanisme eksklusi simbolik.

Ketiga, dalam kerangka modernisasi pendidikan Islam, aturan berpakaian sebaiknya difungsikan sebagai media edukatif yang mendorong kesadaran moral siswa, bukan semata alat penegakan disiplin. Modernisasi pendidikan Islam menuntut integrasi antara nilai religius dan rasionalitas pendidikan modern melalui kebijakan yang reflektif dan dialogis (Ependi, 2019). Dalam konteks ini, ruang dialog pedagogis mengenai makna dan tujuan aturan berpakaian menjadi penting agar siswa memahami regulasi sebagai bagian dari proses pendidikan, bukan sekadar kewajiban formal.

Pendekatan ini sejalan dengan pandangan bahwa pendidikan moral merupakan proses sosial yang melibatkan negosiasi nilai antara institusi dan peserta didik, bukan sekadar transfer norma secara satu arah (Husaeni, 2023). Dengan demikian, kebijakan aturan berpakaian di sekolah Islam idealnya disertai dengan praktik pedagogis yang mendorong pemaknaan, refleksi, dan partisipasi siswa.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa aturan berpakaian di sekolah Islam merupakan praktik sosial yang kompleks, melampaui sekadar implementasi norma religius atau kewajiban administratif semata. Melalui perspektif sosiologi pendidikan, regulasi ini beroperasi sebagai mekanisme pendisiplinan tubuh yang menata kepatuhan siswa, sarana pembentukan identitas kolektif yang membedakan kelompok sosial, serta instrumen kontrol sosial yang mereproduksi relasi kekuasaan dalam sistem pendidikan modern. Sebagai bagian dari proyek modernisasi pendidikan Islam, aturan berpakaian menautkan legitimasi religius dengan rasionalitas birokratis untuk membentuk konstruksi "siswa ideal", namun sekaligus menyimpan ambivalensi yang berisiko membatasi agensi individu serta mereproduksi ketimpangan sosial melalui kekerasan simbolik. Oleh karena itu, kebijakan berpakaian di sekolah Islam menuntut pembacaan yang lebih reflektif dan

dialogis agar tetap berfungsi secara edukatif tanpa kehilangan sensitivitas terhadap kompleksitas pengalaman subjektif serta keragaman latar belakang peserta didik.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, R. N., Utaminingsih, S., & Riswari, L. A. (2024). PEMBENTUKAN KARAKTER DISIPLIN SISWA KELAS VI MELALUI KULTUR SEKOLAH. *JURNAL PENELITIAN BIDANG PENDIDIKAN*, 30(1), 1. <https://doi.org/10.24114/jpbb.v30i1.55059>
- Anam, R. K. (2025). Sociology of Ereignis: A New Ontological Foundation for Prophetic Social Science. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 20(1), 31-62. <https://doi.org/10.14421/k30v0343>
- Asrori, Saifudin; Syauqi, A. (2020). Kontribusi Pendidikan Islam dalam Membentuk Keperibadian Islami. *Al-Amin Journal: Educational and Social Studies*, 37(1), 13-22. <http://ejournal.kopertais4.or.id/sasambo/index.php/alaman/article/view/4101%0Ahttp://ejournal.kopertais4.or.id/sasambo/index.php/alaman/article/download/4101/2864>
- Bourdieu, P. (1977). Outline of a Theory of Practice. In *Cambridge University Press*. <https://doi.org/10.1515/9780822390169-024>
- Brunsmma, D. L. (2006). School Uniform Policies in Public Schools. *Principal*, 85(3), 50-53.
- Ependi, R. (2019). Modernisasi Pendidikan Islam: Latar Belakang, Cakupan Dan Pola. *Al-Fatih: Jurnal Pendidikan Dan Keislaman*, 2(1), 79-96. <https://www.jurnal.stit-althadiyahlabura.ac.id/index.php/alfatih/article/view/26>
- Fawaid Moh. (2017). Implementasi Tata Tertib Sekolah Dalam Meningkatkan Karakter Kedisiplinan Siswa. *Jurnal Civic Hukum*, 2(2), 10.
- Foucault, M. (1975). *Discipline and Punish: The Birth of the Prison*, trans. Alan Sheridan. New York: Vintage.
- Husaeni, M. F. (2023). Critical Literature Review on Moral Education System in Indonesia: How Islamic Education and Pancasila Education Monopolize Morality in Schools. *Muslim Education Review*, 2(1), 65-98. <https://doi.org/10.56529/mer.v2i1.163>
- Ma'arif. (2019). *Tantangan guru PAI di era digital*. UIN Sunan Ampel Press.
- Maftuhin, A. (2018). Sosiologi Tubuh Dan Busana Muslimah. *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam*, 16(1), 19. <https://doi.org/10.14421/musawa.2017.161.19-31>
- Rosmaniere, Kate; Dehli, Karl; Smith, N. de C. (1997). *Disciple, Moral Regulation,, and Schooling* (Vol. 32, Issue 3). Routledge.
- Ruqoiyah. (2019). Modernisasi Pendidikan Islam di Indonesia. *Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Pembelajaran*, 1, 1-12.
- Sari, K. (2022). ANALISIS SOSIAL MAX WEBER: Motif Guru SD Negeri Mendalanwangi 03 Membuat Peraturan Siswa Berseragam Panjang. *Ibtidaiyyah: Jurnal Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah*, 1(3), 227-241. <https://doi.org/10.18860/ijpgmi.v1i3.2385>
- Sarijanah, Herna; Islamy, Fahmi Jahidah; Meilani, R. I. (2025). Regulasi Diri dan Prokrastinasi Akademik: Studi Kuantitatif di Kalangan Siswa SMK. *Jurnal Pendidikan Manajemen Perkantoran (JP Manper)*, 10(1), 119-136.

Stockton, C., Gullatt, D. E., & Parke, D. R. (2002). School Uniforms: Policies and Procedures. *RMLE Online*, 25(1), 1-13.
<https://doi.org/10.1080/19404476.2002.11658154>